



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN  
ESDM RI, DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat Dengan	: Rapat Dengar Pendapat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Utama PT PLN (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 18 Juli 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 17.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Utama PT PLN (Persero)
Acara	: 1. Program 35.000 MW : a. Progres tambahan PPA minimal terhadap 3 (tiga) Pembangkit Mulut Tambang Prioritas (Sumatera dan Kalimantan): - Mekanisme (skenario akuisisi kepemilikan saham perusahaan tambang oleh PT PLN Batubara secara mayoritas untuk lokasi mulut tambang (studi kasus Jambi sebagai model yang sudah berjalan untuk acuan akuisisi yang lain). - Penyiapan SOP PPA dengan pola PT PLN sebagai pemegang saham mayoritas (51%) melalui PT Indonesia Power dan PT PJB. - Target mulai konstruksi dan mulai berproduksi. b. Progres pengembang yang telah mendapat PPA: - Nama pembangkit, tanggal PPA diterbitkan (PPA awal dan PPA Perpanjangan), status saat ini (proses financial closing, selesai financial closing, persiapan konstruksi, kontruksi,...%, dll).

*Handwritten signature*

2. Evaluasi kebutuhan batubara pembangkit (sumber/lokasi tambang, perusahaan pemasok, volume, nilai GAR, harga dan nama pembangkit yang dipasok).
3. Kriteria penerima subsidi listrik (data TNP2K dan tambahan data lain).
4. Besaran dan perhitungan subsidi listrik.

## KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 dibuka pukul 13.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - 1) Program 35.000 MW :
    - a. Progres tambahan PPA minimal terhadap 3 (tiga) Pembangkit Mulut Tambang Prioritas (Sumatera dan Kalimantan):
      - Mekanisme (skenario akuisisi kepemilikan saham perusahaan tambang oleh PT PLN Batubara secara mayoritas untuk lokasi mulut tambang (studi kasus Jambi sebagai model yang sudah berjalan untuk acuan akuisisi yang lain).
      - Penyiapan SOP PPA dengan pola PT PLN sebagai pemegang saham mayoritas (51%) melalui PT Indonesia Power dan PT PJB.
      - Target mulai konstruksi dan mulai berproduksi.
    - b. Progres pengembang yang telah mendapat PPA:
      - Nama pembangkit, tanggal PPA diterbitkan (PPA awal dan PPA Perpanjangan), status saat ini (proses financial closing, selesai financial closing, persiapan konstruksi, konstruksi,...%, dll).
  - 2) Evaluasi kebutuhan batubara pembangkit (sumber/lokasi tambang, perusahaan pemasok, volume, nilai GAR, harga dan nama pembangkit yang dipasok).
  - 3) Kriteria penerima subsidi listrik (data TNP2K dan tambahan data lain).
  - 4) Besaran dan perhitungan subsidi listrik.



## **II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

1. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menerima informasi data tambahan dari masyarakat terhadap akurasi subsidi listrik 900 VA, terutama data dari Anggota Komisi VII DPR RI dari dapilnya masing-masing, agar subsidi tersebut diterima oleh yang berhak dan tepat sasaran.
2. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan data detil pembangkit yang awal peruntukannya dapat berbahan bakar gas untuk disegerakan pembangunan infrastrukturnya.
3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyiapkan pedoman PPA dengan pola PLN sebagai pemegang saham mayoritas.
4. Sehubungan telah terjadinya beberapa kali penundaan terhadap PPA PLTU Mulut Tambang di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Komisi VII DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk memastikan penyelesaian PPA, minimal terhadap 3 (tiga) PLTU Mulut Tambang yang prioritas di wilayah Sumatera dan Kalimantan paling lambat awal Agustus 2017, sehingga target beroperasinya Pembangkit tidak mundur lagi.
5. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk memberikan peringatan terhadap pengembang yang sudah memperoleh PPA tetapi progresnya masih lambat.
6. Untuk percepatan program 35.000 MW, Komisi VII DPR RI mendukung PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa Bali mengambil peran yang lebih besar, yaitu sebagai pemegang saham mayoritas (51%) dalam suatu konsorsium kepemilikan Pembangkit.
7. Untuk menjamin pasokan dan harga batubara untuk PLTU 30 (tigapuluh) tahun kedepan, Komisi VII DPR RI mendukung perubahan orientasi bisnis PT PLN Batubara selain sebagai trader tetapi juga sebagai pemilik tambang.



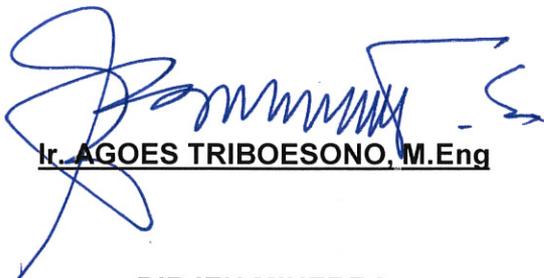
8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan dan data yang diminta Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 24 Juli 2017.

### III. PENUTUP

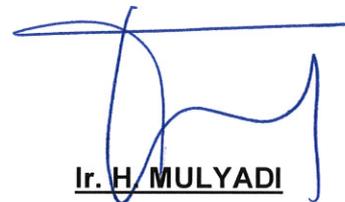
Rapat ditutup Pukul 17.35 WIB

Jakarta, 18 Juli 2017  
KETUA RAPAT,

Pt. DIRJEN KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ESDM RI



Ir. AGOES TRIBOESONO, M.Eng



Ir. H. MULYADI

DIRJEN MINERBA  
KEMENTERIAN ESDM RI



Ir. BAMBANG GATOT ARIYONO, MM

Pt. DIREKTUR UTAMA  
PT PLN (PERSERO)



SARWONO SUDARTO